

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Laju pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan parameter dari pengukuran keberhasilan pembangunan. Konsep ekonomi inklusif merefleksikan upaya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang pesat guna menjembatani kesenjangan dengan negara-negara maju (Shaleh, 2021). Meskipun pertumbuhan ekonomi yang pesat adalah tujuan utama, pendekatan seperti ini seringkali mengorbankan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesenjangan sosial (Arrfah & Syafri, 2022). Konsekuensinya, pembangunan yang dihasilkan bersifat tidak inklusif, hanya menyentuh segmen masyarakat tertentu dan tidak merata di semua aspek kehidupan. Hal ini mendorong perubahan dalam pembangunan ekonomi. Untuk menjadi inklusif, pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi serta kualitas pertumbuhan itu.

Dalam gagasannya, Pembangunan Ekonomi inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang diciptakan dengan peluang yang setara dan dapat diakses oleh semua orang dan bukan hanya bagi mereka yang miskin. Pembangunan ekonomi inklusif berarti pembangunan yang membuat semua orang mempunyai kesempatan yang sama, mengurangi kesenjangan antar golongan maupun daerah, dan meningkatkan kesejahteraan (Israf & Prasetya, 2023). Mengacu pada Bappenas (2018), pembangunan ekonomi inklusif adalah pendekatan pembangunan yang memastikan bahwa semua orang tanpa terkecuali memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses pembangunan ekonomi. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan baik di tingkat individu maupun regional.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan perjanjian global yang terdiri dari delapan poin, termasuk pembangunan ekonomi inklusif. Dimana poin ini memerlukan pertumbuhan ekonomi yang dapat mencapai pemerataan, penurunan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang cepat (Widianingsih & Paskarina, 2019). Implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia secara resmi dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017. Indonesia berkomitmen untuk mendukung agenda SDGs untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Selain itu secara nasional, Bappenas membuat Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk menentukan tingkat inklusi pembangunan pada tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Sejak tahun 2018, Bappenas secara resmi memperlakukan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang telah dihitung sejak tahun 2011. IPEI merupakan instrument pengukuran yang komprehensif mencakup dimensi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, serta akses dan kesempatan yang diwujudkan dalam 21 indikator terstruktur dalam tiga pilar dan delapan sub indeks.

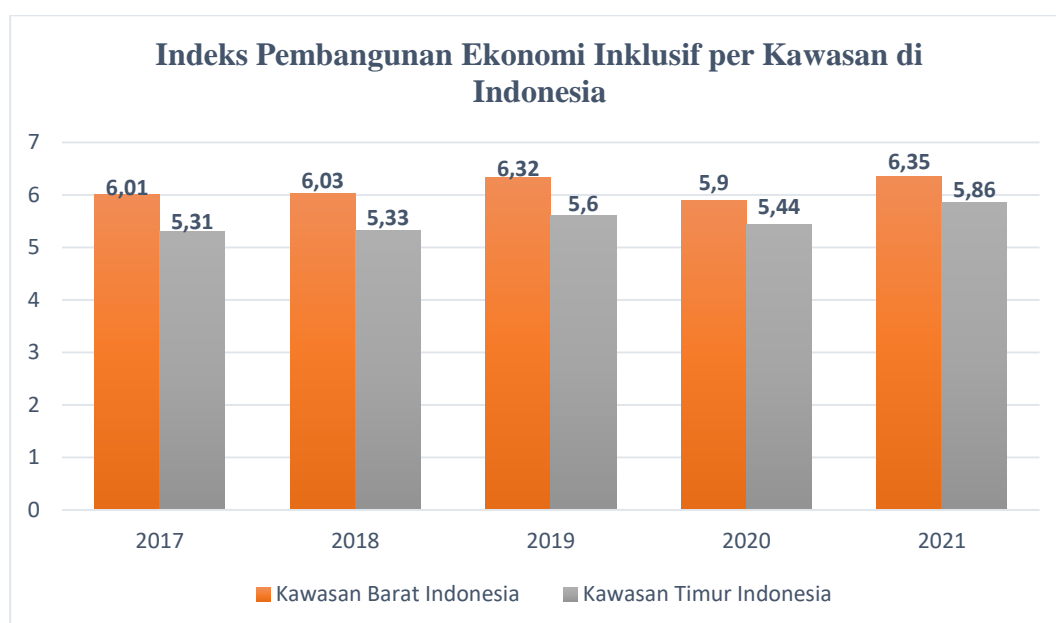
**Tabel 1.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia tahun 2017-2021**

Tahun	IPEI
2017	5,77
2018	5,79
2019	6,00
2020	5,62
2021	6,05

Sumber: Bappenas (data diolah Penulis)

Berdasarkan tabel, nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif berada pada kisaran 5,77 hingga 6,05 dari tahun 2017 hingga 2021, dan termasuk kategori memuaskan menurut skala kepuasan pembangunan ekonomi inklusif yang dibuat oleh Bappenas. Capaian indeks pembangunan ekonomi inklusif

Indonesia tidak terlepas dari kontribusi setiap Provinsi di Indonesia. Menurut Kementerian Dalam Negeri Indonesia (2017) wilayah administratif negara Indonesia terbagi atas 34 provinsi yang secara geografis dikategorikan menjadi dua kawasan yaitu Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Secara umum, pencapaian pembangunan ekonomi inklusif di KBI dan KTI berbeda, di KBI pembangunan ekonomi inklusif lebih besar dibandingkan di KTI.



**Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif per Kawasan di Kawasan**

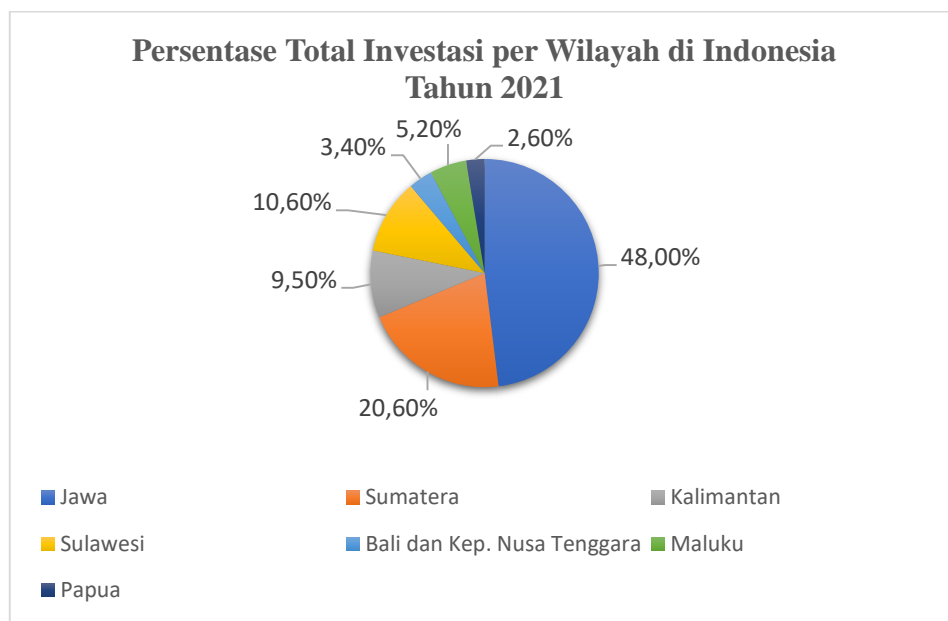
Sumber: Bappenas (data diolah Penulis)

Gambar di atas mengindikasikan bahwa tingkat Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Wilayah Timur lebih rendah dibandingkan dengan Wilayah Barat. Ini menunjukkan adanya perbedaan dalam pencapaian ekonomi inklusif antara Wilayah Timur dan Wilayah Barat Indonesia. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pembangunan ekonomi inklusif, yang bertujuan untuk memastikan distribusi ekonomi yang merata dan menghilangkan ketidakadilan ekonomi. Tambahan lagi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 secara khusus menitikberatkan pada upaya pengembangan ekonomi inklusif di Kawasan Timur.

Ketimpangan Pembangunan diantara Kawasan Timur Indonesia dengan Kawasan Barat Indonesia akan berdampak negatif berupa perekonomian yang tidak efisien, stabilitas ekonomi dan sosial yang lemah, serta adanya ketidakadilan (Dewanto & Rahmawati, 2021). Namun, dampak positif adanya ketimpangan ini akan mendorong pada wilayah yang pembangunan ekonomi inklusif rendah untuk berusaha meningkatkan pembangunan ekonomi di wilayahnya agar tidak tertinggal. Perbandingan yang dilakukan antara dua kawasan tersebut menunjukkan bahwa, Kawasan Timur Indonesia menghadapi masalah tingkat pembangunan ekonomi inklusif yang rendah dan Kawasan Barat Indonesia juga harus mempertimbangkan tingkat kemajuan yang tinggi dalam pembangunan ekonomi inklusif.

Laporan analisis yang dirilis oleh Bappenas (2018) menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di wilayah KTI masih memiliki capaian indeks pembangunan ekonomi inklusif yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional. Namun, indeks pembangunan ekonomi inklusif Indonesia meningkat secara signifikan di seluruh Provinsi dari tahun 2017-2021. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai nilai 5,62. Fenomena serupa terjadi di Provinsi Papua, dimana penurunan indeks terjadi satu tahun sebelumnya.

Pembangunan ekonomi inklusif sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh factor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan tingkat perkembangan teknologi (Rahmawati et al., 2021). Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka panjang, pemerintah memerlukan modal untuk menjalankan proyek pembangunan yang memudahkan mobilisasi dan penyaluran dana pada bidang yang dapat memberikan kontribusi besar pada perekonomian. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan sumber pendanaan yang krusial bagi pembangunan suatu wilayah (Kambono & Marpaung, 2020).



**Gambar 1. 2 Persentase Total Investasi per Wilayah di Indonesia Tahun 2021**

Sumber: Kementerian Investasi Republik Indonesia (data diolah Penulis)

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Investasi Republik Indonesia, terlihat bahwa Pulau Jawa yang termasuk wilayah di Kawasan Barat Indonesia menempati posisi teratas pada persentase total investasi di Indonesia. Sedangkan persentase total investasi terendah berada di Papua yang termasuk wilayah di Kawasan Timur Indonesia. Jika dilihat secara keseluruhan total investasi cukup tersebar di berbagai wilayah yang mengindikasikan potensi pada masing-masing provinsi dalam menarik investor untuk berinvestasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian oleh Lestari, Santoso, dan Saputra (2022) menemukan bahwa Investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di negara-negara ASEAN berpendapatan menengah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Anand, Mishra, dan Peiris (2013) yang menemukan bahwa investasi asing mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di negara-negara emerging markets.

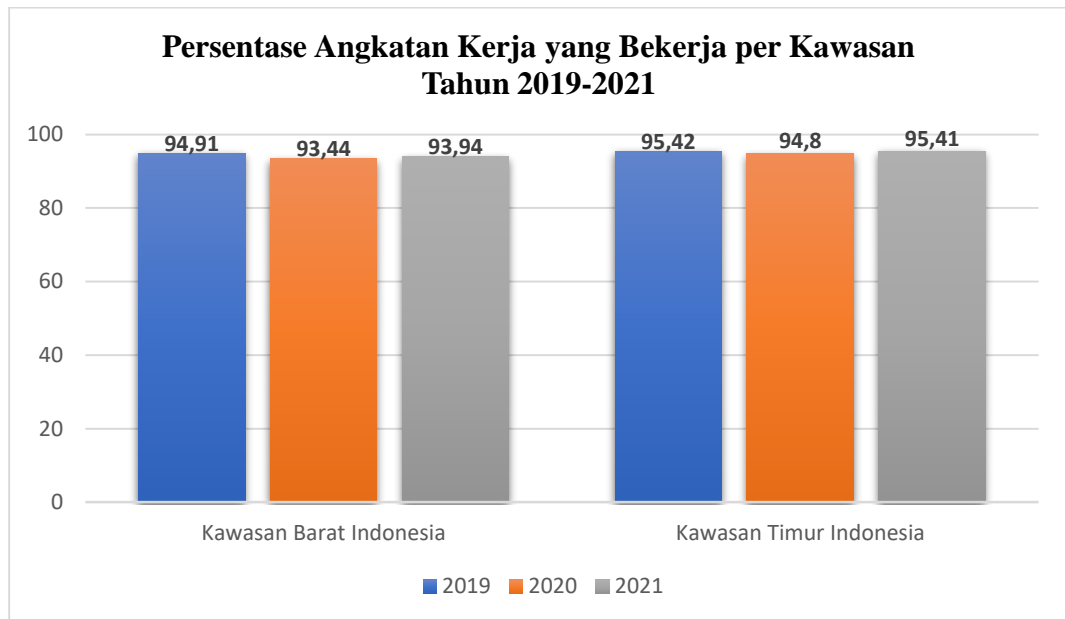
Berbagai kajian empiris menunjukkan adanya korelasi positif antara investasi dan pertumbuhan ekonomi inklusif baik tingkat regional ASEAN maupun global. Meskipun demikian, hasil penelitian mengenai pengaruh

relative PMA dan PMDN masih inkonsisten, tergantung pada konteks geografis dan karakteristik ekonomi masing-masing negara.

Tenaga Kerja juga merupakan komponen pembangunan. Tenaga kerja adalah orang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, memiliki pekerjaan, atau sedang mencari kerja. Dalam hal ini, tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dari kemampuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan baik bagi pekerja yang membutuhkan pekerjaan maupun pekerja yang sudah bekerja tetapi masih mencari. Kemampuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan ini semakin penting karena jumlah penduduk yang bertambah setiap tahun akan menambah jumlah orang yang berusia kerja.

Pembangunan ekonomi akan dianggap tidak berhasil jika pertumbuhan penduduk usia kerja ini tidak menghasilkan kemampuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Akibatnya, angka kemiskinan akan meningkat karena tenaga kerja yang tidak terserap dan lebih sedikit penduduk usia kerja yang dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian. Dalam Pembangunan ekonomi inklusif ditekankan adanya pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian untuk memastikan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi terdistribusi secara merata (Pratiwi & Kurniasari, 2023).

Kemampuan menyediakan lapangan pekerjaan dan partisipasi aktif tenaga kerja dalam perekonomian inilah yang tercermin dalam persentase angkatan kerja yang bekerja terhadap angkatan kerja secara keseluruhan. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak angkatan kerja yang mampu terserap oleh lapangan pekerjaan dan partisipasi aktif dalam perekonomian. Peningkatan angkatan kerja yang aktif dalam sektor ekonomi ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya berdampak pada peningkatan taraf perekonomian dan pengurangan kemiskinan karena tingkat ketergantungan terhadap angkatan kerja yang bekerja menurun.



**Gambar 1.3 Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja per Kawasan  
Tahun 2019-2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah Penulis)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa keadaan ketenagakerjaan di Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia berada pada tingkat cukup tinggi dengan persentase angkatan kerja yang bekerja lebih dari 90% dari total angkatan kerja. Walaupun demikian, kedua kawasan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Perlu diketahui bahwa semakin banyak penduduk yang bekerja, maka semakin besar pula kontribusi mereka terhadap perekonomian. Namun terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021 pada masing-masing kawasan. Semakin banyak orang yang bekerja dan terserap maka semakin banyak pula masyarakat yang berpartisipasi dalam ekonomi. Menurut penelitian Pratisi dan Kurniasari (2023) tentang pengaruh indikator ketenagakerjaan terhadap pembangunan ekonomi inklusif, tingkat partisipasi angkatan kerja mempengaruhi Pertumbuhan Inklusif Indonesia.

Penelitian sebelumnya oleh Ramadhan dan Setiadi (2019) juga menemukan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mempengaruhi indeks Inklusif di Indonesia. Namun, penelitian oleh Cabeza-Garcia, B. Del Brio, dan

Oscanoa-Victorio (2018) menemukan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak mempengaruhi Pertumbuhan Inklusif di 127 negara. Hal ini disebabkan oleh penurunan upah yang disebabkan oleh angkatan kerja yang bekerja berlebihan sehingga terjadi ketergantungan pada penduduk berusia kerja.

Pembangunan Ekonomi Inklusif menekankan infrastruktur berupa pemerataan akses tanpa memandang gender ataupun wilayah. Infrastruktur tidak hanya dipandang secara fisik tetapi juga non fisik terutama dengan perkembangan dunia saat ini dimana teknologi berkembang semakin maju (Tambunan & Rini, 2021). Kemajuan teknologi menyebabkan perubahan dan perkembangan segala bidang yang mempengaruhi produktivitas output yang dihasilkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Lestari & Rahmawati, 2021). Sehingga, mayoritas negara-negara di dunia terus melakukan inovasi untuk memajukan teknologi bagi perekonomian negaranya.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dibuat oleh Badan Pusat Statistik untuk mengukur kemajuan teknologi. Indeks ini mengacu pada *Information Communication Technology Development Index* yang dibuat oleh International Telecommunication Union. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini mengukur tingkat pembangunan, pertumbuhan, kesenjangan digital, dan potensi TIK suatu wilayah. Indeks ini bertujuan untuk memastikan pemerataan akses pada setiap wilayah yang mendorong pembangunan ekonomi inklusif.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pembangunan maupun penggunaan teknologi terhadap pembangunan ekonomi inklusif oleh Tambunan dan Dini (2021) menyatakan bahwa akses teknologi yang diukur dengan persentase penduduk yang memiliki akses komputer dan internet mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia tahun 2017-2018. Penelitian lainnya oleh Lestari dan Rahmawati menunjukkan bahwa ICT mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia tahun 2017-2019.



Menanggapi permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi hubungan antara Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif. Penelitian ini merupakan penyempurnaan dari studi sebelumnya karena menggunakan data yang lebih terbaru dengan rentang waktu 2017-2021 serta mencakup wilayah yang diteliti, yaitu Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia, yang memiliki aspek menarik untuk dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul ***“Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia.”***

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Investasi terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kawasan Timur Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kawasan Timur Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kawasan Timur Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh Investasi terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kawasan Barat Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kawasan Barat Indonesia?
6. Apakah terdapat pengaruh Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kawasan Barat Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh Investasi terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kawasan Timur Indonesia
2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kawasan Timur Indonesia
3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kawasan Timur Indonesia
4. Mengetahui apakah terdapat pengaruh Investasi terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kawasan Barat Indonesia
5. Mengetahui apakah terdapat pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kawasan Barat Indonesia
6. Mengetahui apakah terdapat pengaruh Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kawasan Barat Indonesia

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca, terutama mengenai dampak Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kawasan Timur dan Kawasan Barat Indonesia.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi Pembaca  
Studi ini bisa menjadi sumber informasi bagi pembaca mengenai faktor-faktor yang berperan dalam mendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif di Wilayah Timur dan Wilayah Barat Indonesia.
  - b. Bagi Peneliti  
Studi ini memperkaya pemahaman peneliti, khususnya terkait Pembangunan Ekonomi Inklusif dan berbagai faktor yang

memengaruhi perkembangan ekonomi inklusif di Wilayah Timur dan Wilayah Barat Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Studi ini dapat menyediakan informasi penting bagi para pembuat kebijakan dalam usaha untuk memperkuat Pembangunan Ekonomi Inklusif di Wilayah Timur dan Barat Indonesia. Terutama, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan ekonomi inklusif antara kedua wilayah tersebut, termasuk dalam konteks pembangunan ibu kota baru yang terletak di antara Wilayah Timur dan Barat Indonesia.

